

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____, 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

King Faisal Sulaiman. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.

Maruarar Siahaan. 2006. *Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi 2)*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

R. Abdoel Djamali. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada.

Yusnani Hasyimzoem dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

C. Internet

Eka Nam Sihombing. 2017. *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. Jurnal Yudisial. Volume 10. Nomor 2.

Inna Junaenah. 2016. *Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi. Volume 13. Nomor 3.

Jeremia Radix. 2017. *Kewenangan Mendagri Membatalkan Perda Dalam Kedudukannya Sebagai Lembaga Eksekutif*. Ejournal Unitomo. Volume 3. Nomor 2.

Novira Maharani Sukma. 2017. *Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri*. Jurnal Justisia. Volume 5. Nomor 12.

Wahyu Tri Hartomo. 2018. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU/XIII/2015 Dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 15. Nomor 2.



<http://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian-peraturan-perundang-undangan-oleh-mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah/>

<http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/13/presiden-umumkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e5f4f15b574/catat-kini-pembatalan-perda-kabupaten-kota-wewenang-ma>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt542f9da05dba4/seluk-beluk-dan-proses-pencabutan-undang-undang>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fd70f334428/masalah-pembatalan-perda-oleh-mahkamah-konstitusi-oleh--muhammad-amin-putra/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc39c5d3a98/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu/>

<https://www.theindonesianinstitute.com/polemik-kewenangan-pembatalan-perda/>

<https://www.kompasiana.com/fathrahman/5b1a357ebde5752524038c52/pemerintah-pusat-memohon-judicial-review-perda?page=2>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/11/05050051/pasca.putusan.mk.ke-menkumham.akan.kaji.perda.sebelum.disahkan>

<https://setkab.go.id/ihwal-pembatalan-perda/>